

## Pemberdayaan Masyarakat dan Pariwisata dalam Pengelolaan Bencana Alam di Pantai Widarapayung

Rokalina<sup>1</sup>, Suwarno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>SMP Negeri 2 Kesugihan

<sup>2</sup>Pendidikan IPS, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v6i.434](https://doi.org/10.30595/pssh.v6i.434)

Submitted:

May 20, 2022

Accepted:

July 15, 2022

Published:

July 28, 2022

---

#### Keywords:

Community Empowerment;  
Tourism; Disaster  
Management; Widarapayung

---

### ABSTRACT

*The prospect of the tourism industry in Indonesia is very large and promising considering that Indonesia has abundant natural resources, one of which is in the coastal sector. By empowering the community, people can increase their knowledge and ability to be able to identify problems, plan, and implement solutions by utilizing local potential and existing facilities, such as disaster management. This study aims to determine the efforts made for community empowerment and tourism in disaster management on the Widarapayung beach. This type of research uses descriptive qualitative research. The subjects of this research are the widarapayung beach manager, the widarapayung village apparatus, the widarapayung community and related institutions. Data collection techniques were carried out through observation, literature review and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. Based on the results of research with SWOT analysis, in community empowerment and tourism at Widarapayung Beach, it is necessary to apply eight strategies in disaster management, namely planning, organizing, leadership, coordinating, controlling, monitoring, budgeting and finance.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### Corresponding Author:

**Rokalina,**

SMP Negeri 2 Kesugihan

Jl. Betet, Slarang, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53271

Email: [rokaliana4@gmail.com](mailto:rokaliana4@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Terjadinya bencana dikawasan pantai yang menjadi kawasan utama pariwisata di Indonesia ternyata masih meninggalkan beberapa catatan penting dalam proses penataan kembali. Namun, tahap pelaksanaan pembangunan kembali di lapangan ternyata masih terkendala dengan situasi dan kondisi yang melingkupi munculnya kebijakan pemerintah daerah atas program pembangunan kembali kawasan wisata pantai yang ada. Seperti di pantai Widarapayung, perlu adanya pegelolan yang matang pasca bencana karena ini merupakan sumber pencaharian masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar sebagai pembangkit perekonomian, namun keberadaanya sangat rentan terhadap bencana baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Pariwisata adalah industry yang selalau dihantui oleh krisis dan bencana, bahkan bisa dikatakan sangat sensitive dan rapuh karena sangat mudah untuk dipengaruhi oleh perubahan maupun kejadian yang di sekelilingnya [1]. Yang paling penting karena keputusan perjalanan wisata dimulai dari niat manusia, sehingga rentan terhadap persepsi resiko dan fluktuasi lingkungan. Sebagian besar manusia akan melakukan perjalanan wisata apabila destinasi yang dikunjungi terbebas dari bencana, gangguan keamanan dan tentu saja untuk bersenang-senang. Selain itu, bencana merupakan kejadian

yang tidak terduga serta tidak dapat dihindari muncul dalam bentuk dan intensitas yang berbeda, oleh karena itu kebangkitan pariwisata ditandai dengan kompleksitas dan beberapa kriteria yang bertentangan dengan bencana[7].

Pariwisata diharapkan dapat membawa berbagai manfaat yang cukup berarti dalam pembangunan, karena berbagai kegiatan dalam bidang kepariwisataan dapat meningkatkan perekonomian yang signifikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Dibalik perkembangan sektor pariwisata yang mengesankan tersebut, ada kekhawatiran terhadap pengembangan pariwisata, bahwa pariwisata adalah salah satu bentuk kapitalisme baru yang cenderung memeras masyarakat lokal. Didalam menjawab berbagai kritikan tersebut, konsep pengembangan pariwisata saat ini mencoba untuk meningkatkan peran aktif masyarakat sehingga mengurangi tingkat kebocoran ekonomi dan memberikan manfaat lebih banyak masyarakat lokal (I Gede Turnajaya, 2016:2).

Aspek pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai upaya penguatan dan peningkatan kapasitas peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, berperan aktif dan strategis sebagai subyek maupun penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan. Konsep tersebut memberikan gambaran posisi masyarakat yang strategis sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Namun, demikian, kondisi lapangan menunjukkan bahwa peran dan posisi masyarakat baik sebagai subjek dan penerima manfaat pengembangan masih belum berjalan optimal. Belum optimalnya, peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata disebabkan oleh beberapa hal (I Gede Turnajaya, 2016:4).

Dalam konteks posisi masyarakat sebagai penerima manfaat pengembangan pariwisata, serapan manfaat ekonomi ke masyarakat belum mencapai kondisi yang ideal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan masyarakat local dalam mengelola dan mengembangkan produk dan jasa. Oleh karena itu, pemberdayaan, masyarakat melalui sektor pariwisata diharapkan dapat menjadikan salah satu alat yang dapat dipakai untuk membangun kapasitas masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pengelolaan bencana alam yang ada di pantai widarapayung maka dibutuhkannya pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata diharapkan dapat menjadikan salah satu alat yang dapat dipakai untuk membangun kapasitas masyarakat sebagai aktor pembangunan yang berkemampuan membangun wilayah dan kesejahteraannya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari informan yang mewakili keseluruhan sumber data. Seperti yang di ungkapkan Bogdan Taylor dalam [2], metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang sumber data dari dinas/instansi terkait. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan kajian pustaka. Subyek penelitian ini adalah pengelola pantai widarapayung, perangkat desa widarapayung, masyarakat widarapayung dan lembaga-lembaga yang terkait. Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang memiliki karakteristik bahwa datanya dalam sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan [3].

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Hasil Penelitian**

Peristiwa tsunami yang terjadi di Samudra Hindia selatan Cilacap pada tahun 2006 menjadi salah satu bencana yang menewaskan banyak penduduk sekitar pantai. Gempa yang berkekuatan 7,7 skala Richter (SR) yang memicu gelombang tsunami, bukanlah yang terjadi di Cilacap melainkan di Pangandaran. Air bergerak dari arah barat yakni Pangandaran menuju ke timur yaitu Cilacap. Di kota Cilacap tidak terasa dampaknya, karena ada perlindungan dari pulau Nusakambangan. Namun, daerah yang timur Nusakambangan terdampak cukup parah, salah satunya Pantai Widarapayung di Desa Widarapayung Wetan. Di Pantai Widarapayung tercatat 70 orang meninggal (14 orang warga asli Desa Widarapayung lainnya adalah petani, pengunjung dan warga lainnya) dan 1 orang hilang.

Sejumlah sarana dan prasarana penunjang pariwisata di daerah tersebut luluh lantak di terjang ganasnya tsunami. Banyak sekali bangunan sekitar pantai yang rusak dan juga banyak sekali sampah dari laut yang terdampar di pesisir Pantai Widarapayung. Oleh karena itu, tidak hanya masalah pembangunan fisik saja yang dihadapi pasca bencana, akan tetapi menyangkut seluruh ekosistem yang ada di sana, baik keadaan alam maupun sosial masyarakat yang sangat memprihatinkan.

Peran pemerintah (khususnya Daerah Kabupaten Cilacap) dalam melakukan mitigasi bencana sangat besar, pemerintah daerah Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerjasama dengan

lembaga terkait selalu merespon seiring dengan aktivitas laut [9]. Mulai dari fase tanggap darurat, recovery, rekonstruksi dan pengembangan. SEtiap fase tersebut dilakukan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia dan juga adanya dukungan politik dari pemerintahan pusat maupun daerah. Terjadinya konsesus diantara para penyelenggara pemerintahan di daerah, instrumen APBD juga dipakai untuk membiayai korban bencana tersebut. Pengelolaan informasi tidak kalah pentingnya dilakukan mengingat kondisi alam yang tidak menentu sewaktu-waktu ada gempa susulan atau tsunami yang harus diinformasikan secara menyeluruh ke masyarakat. Demikian juga setelah pasca tsunami, pengelolaan informasi ini masih tetap berlanjut terutama dalam fase tanggap darurat dan recovery. Desiminasi informasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam rangka mengurangi resiko akibat bencana. Sumberdaya yang dikelola dengan melalui penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang terkena bencana dan yang paling utama agar tidak semakin banyak memakan korban.

Wisata Pantai Indah Widarapayung terletak sekitar 25-30 km sebelah timur Kota Cilacap. Secara geografis, wisata Pantai Indah Widarapayung posisinya lebih dekat dengan Kabupaten Kebumen yakni sekitar 15 km dari Kawasan wisata yang terkenal seperti Goa Jatijajar, Goa Petruk, dan lainnya. Beberapa objek wisata yang rencana akan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kbutupaten Cilacap yaitu wisata religi (srandil selok) dan Pantai serimbit membuat sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi Kawasan yang integrated.

Perubahan gaya hidup masyarakat, akses informasi yang semakin baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta adanya kesadaran dari masyarakat bahwa wisata sudah menjadi kebutuhan penting. Wisata keluarga yang pada umumnya menggemari lokasi wisata yang mempunyai fasilitas lengkap dan nyaman, namun banyak wisata yang belum memenuhi syarat. Dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cilacap setaip tahun jumlah wisatawan meningkat sampai 64.918 pengunjung. Jadi, dengan lokasi yang strategis, mudah di akses maka Kawasan wisata Pantai Indah Widara Payung ini mempunyai selling point tersendiri apabila dikembangkan menjadi Kawasan wisata terpadu.

Pengembangan Kawasan wisata Pantai Indah Widarapayung pasca bencana, dimana setelah peristiwa bencana tsunami yang merusak sejumlah sarana dan prasaran maka dengan diusulkan menjadi Kawasan bahari untuk keluarga, sehingga sejalan dengan usulan tersebut maka perlunya rekontruksi Kembali fasilitas yang ada. Adapun fasilitas tersebut antara lain: kolam renang, bangunan pendukung (kantor pengelola, ruang ticketing, dan infrastruktur lainnya), Resort/hotel/motel (landscape), Fasilitas komersil (souvenir center, café, pertokoan), Aquarium, dan taman bermain. Pengelolaan yang ada di Kawasan wisata pantai widara paying ini perlu ditata ulang seperti pembangunan kolam renang, taman bermain, warung-warung dan lainnya sehingga bisa dikelola secara tunggal dan efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya benturan.

Maka apabila di analisis menggunakan analisis SWOT tentang pemberdayaan masyarakat dan pariwisata dalam pengelolaan bencana pada pantai indah widarapayung dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Strenght* (Kekuatan): Keinginan pemerintahan kabupaten Cilacap dalam memajukan wisata bahari di Kabupaten Cilacap, Penerbangan Cilacap-Jakarta setiap hari (3 x sehari), Keramah tamahan masyarakat local kepada wisatawan, Lokasi yang sangat startegis, Keanekaragaman objek wisata alam di sekitar Wisata Pantai Indah Widarapayung sebagai obyek wisata penunjang, Lokasi Wisata Pantai Indah Widarapayung yang luas, Pelabuhan laut internasional (bongkar/muat barang).
- 2) *Weakness* (Kelemahan): Tidak memiliki SDM yang handal dibidang tourism, Infrastruktur pendukung obyek wisata yang kurang memadai, Belum ada penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, kurangnya sarana akomodasi yang memadai, Belum tergarapnya promosi wisata yang menarik.
- 3) *Oportunity* (Peluang): Wisata Pantai Indah Widarapayung memiliki potensi alam yang mempesona terutama laut, Masih terbukanya pasar wisata bahari dan wisata religi, Dekat dengan lokasi wisata di daerah Kebumen, Edukasi mengenai bencana alam untuk mengundang wisatawan anak-anak.
- 4) *Threat* (Ancaman): Kurangnya kesadaran masyarakat local untuk turut menjaga kebersihan, Adanya persaingan pemasaran wisata antara daerah ataupun Negara, dimana promosi yang dilakukan lebih gencar, mengingatkan para pihak pelaku untuk mengambil langkah tepat pemasaran.

## b. Pembahasan

### 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pariwisata

Pemberdayaan masyarakat pariwisata merupakan konsep yang mudah dilontarkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan, karena konsep ini merupakan suatu konsep yang holistik dan terus menerus untuk digali dan diberdayakan yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kaum manula harus ikut dilibatkan dan dipahami. Diberdayakan dalam arti filosofi hidup masyarakat, Pendidikan, keterampilan, sikap/tata krama, aturan masyarakat, adat, bahkan sampai pada penampilan masyarakat itu sendiri.

Kepariwisata sebagai salah satu kegiatan pembangunan diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigm*) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global.

Dari beberapa ulasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Tantangan mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat adalah memerlukan pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat *top down*.

Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua perefektif. Pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan, program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat. Kedua, partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri.

### 2) Pengelolaan Bencana

#### a) Pengertian Pengelolaan Bencana

Menurut Mary Parker Folet mendefinisikan pengelolaan (manajemen) sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain [6]. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

Definisi pengelolaan (manajemen) yang lebih kompleks dan mencakup berbagai aspek penting dikemukakan oleh Stoner, yakni manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha pada anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Bab I Pasal 1 Ayat 1, Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Pada ayat 2, 3, dan 4 bencana dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan penyebabnya, yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial [11]. Dalam buku *Disaster Managemen A Disaster Manager's Handbook* adalah suatu kejadian alam atau buatan manusia secara progresive menimbulkan dampak yang dasyat sehingga masyarakat yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa [8].

Mengacu pada definisi di atas maka bencana merupakan serangkaian peristiwa berupa kekacauan yang disebabkan, baik dari faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia pada pola normal kehidupan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kekacauan ini biasanya terjadi secara progresive, tidak disangka dan wilayah cakupan cukup luas.

Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan Tindakan-tindakan terkait pencegahan, pengurangan, persiapan, respon darurat dan pemulihan [8]. Menurut Neil Grigg phase utama dan fungsi pengelolaan secara umum termasuk dalam pengelolaan bencana, meliputi [4]:

- (1) Perencanaan (*planning*) meliputi: identifikasi masalah bencana atau sasaran pengelolaan bencana yang ditargetkan, pengumpulan data primer dan skunder, penentuan metode yang digunakan, investigasi dan analisis atau kajian, dan penentuan solusi dengan berbagai alternatif.
- (2) Pengorganisasian (*organising*). Organize berarti mengatur sehingga pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak, dan kewajiban semua pihak yang masuk dalam suatu kelompok organisasi.
- (3) Kepemimpinan (*directing*). Lebih dominan ke aspek-aspek leadership, yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan, pembinaan, pengarahan, motivator, reward dan punishment, konselor dan pelatihan.
- (4) Pengkoordinasian (*coordinating*). Koordinasi adalah upaya bagaimana mengordinasi sumber daya manusia agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagaimana maupun menyeluruh dari suatu kegiatan sehingga dapat dipastikan SDM dapat bekerja secara tepat dan benar.
- (5) Pengendalian (*controlling*). Pengendalian merupakan upaya control, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM, organisasi, hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada.
- (6) Pengawasan (*supervising*). Pengawasan dilakukan untuk memastikan SDM bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. Pengawasan berfungsi untuk memastikan suatu proses berjalan dengan semestinya sesuai tujuan, target dan sasaran serta kegiatan sudah dilakukan dengan baik.
- (7) Penganggaran (*budgeting*). Dalam hal pengelolaan bencana, penganggaran juga menjadi salah satu factor utama suksesnya suatu proses pembangunan baik situasi normal atau darurat mulai dari studi, perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan maupun peningkatan system infrastruktur yang ada.
- (8) Keuangan (*financing*). Awal dari perencanaan finansial adalah proses penganggaran. Ketika tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap kegiatan institusi/ organisasi sudah teridentifikasi Langkah selanjutnya adalah menentukan program kerja, perhitungan biaya, dan manfaat, analisis resiko dan kesuksesan program.

Pada dasarnya pengelolaan bencana merupakan sebuah proses yang dinamis, proses tersebut terdiri dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan yang melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama.

#### b) Pengelolaan Bencana Terpadu

Pengelolaan bencana terpadu merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua stakeholders dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor silang [5]. Pengelolaan bencana terpadu dikelompokkan dalam tiga elemen penting yakni sebagai berikut:

- (1) *Enabling Environment* diterjemahkan sebagai suatu pengkondisian yang mungkin terjadi. Dalam hal pengelolaan bencana maka pengertiannya adalah hal-hal utama atau substansi-substansi pokok yang membuat pengelolaan dilakukan dengan cara-cara, strategi, dan langkah-langkah ideal yang tepat sehingga tercapai tujuan pengelolaan bencana yang optimal. Menurut Global Water Partnership (GWP) terdapat tiga hal substansi/prinsip dalam pengkondisian itu, yakni: kebijakan, kerangka kerja legislatif, dan finansial (Global Water Partnership, 2001).



- (2) Seperti sudah disebutkan bahwa pengelolaan bencana adalah kompleks dan saling ketergantungannya sangat tinggi, maka dalam kelembagaan perlu dibuat organisasi lintas batas, baik secara nasional, propinsi maupun kabupaten kota. Institusi nasional resmi dan legal yang menangani pengelolaan bencana sampai saat ini adalah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) di tingkat nasional, di tingkat provinsi dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorlak), di tingkat kabupaten dibentuk Satuan Pelaksana (Satlak).
- (3) Instrumen-instrumen pengelolaan bencana meliputi: analisis penilaian bencana, perancangan dan pengelolaan bencana terpadu, instrument perubahan social, resolusi konflik, pengendalian perencanaan tata guna lahan dan perlindungan alam dan, pengalihan dan pengelolaan data dan informasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pemberdayaan masyarakat dan pariwisata dalam pengelolaan bencana menggunakan Teknik SWOT menunjukkan pengembangan wisata bahari di Wisata Pantai Indah Widarapayung dapat dijalankan. Beberapa strategi yang dapat dijalankan antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas pariwisata yang masih kurang memadai sehingga perlu ditinjau dengan mengadakan pelatihan SDM dan perbaikan infrastruktur. Dan juga menambahkan wisata edukasi tentang bencana tsunami dan sejarah daerah setempat.
- 2) Membentuk sebuah paguyuban ataupun organisasi untuk pembagian kerja, tugas, hak, dan kewajiban semua pihak dalam mengelola pariwisata.
- 3) Memilih ketua untuk mengambil setiap keputusan serta memberikan pembimbingan, pembinaan, pengarahan, motivator, reward dan punishment, konselor dan pelatihan bagi semua masyarakat.
- 4) Mengordinasi sumber daya manusia agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagaimana maupun menyeluruh dari suatu kegiatan sehingga dapat dipastikan SDM dapat bekerja secara tepat. Misalnya ikut mengelola pariwisata dengan berdagang atau menjaga fasilitas yang ada.
- 5) Mengupayakan dalam mengawasi, evaluasi dan monitoring terhadap SDM untuk mengetahui progres dari pengelolaan pariwisata tersebut.
- 6) Mengawasi proses pengelolaan pariwisata dengan semstinya sesuai target dan tujuan.
- 7) Menganggarkan pengelolaan pariwisata sehingga sukses dalam suatu proses pembangunan serta pemeliharaan/peningkatan infrastruktur yang ada, seperti: membayar tiket masuk pariwisata.
- 8) Menentukan program kerja, perhitungan biaya dan manfaat, analisis resiko dan kesuksesan program.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Henderson, *"Tourism management and the Southeast Asian economic and environmental crisis: a Singapore perspective"*, Managing Leisure, vol. 4, no. 2, pp. 107-120, 1999. Available: 10.1080/136067199375887.
- [2] L. J. Moelong, *Metodologi penelitian kualitatif, Edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- [3] M. Kasiram, *Metodologi penelitian kualitatif - kuantitatif, 2nd ed*. Malang: UIN Maliki Press., 2010.
- [4] N. S. Grigg, *Infrastructure Engineering and Management*. Universitas Michigan: Wiley, 1988, 2007.
- [5] R. Kodoatie and R. Sjarief, *Pengelolaan sumber daya air terpadu*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- [6] S. E. Tisnawati, *Pengantar manajemen ; edisi pertama*, 1. Jakarta Selatan: Sule ernie tisnawati, 2009..
- [7] V. Wickramasinghe, *"Analytical Tourism Disaster Management Framework for sustainable tourism following a sudden calamity"*, European Journal of Tourism Research, vol. 1, no. 2, pp. 132-136, 2008. Available: 10.54055/ejtr.v1i2.17.
- [8] W. Carter, *Disaster management. Manila*, Philippines: Asian Development Bank, 2008..
- [9] Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap. 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- [10] Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Cilacap.
- [11] Undang-undang R.I Nomor: 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: bakornas pb.